



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL (LEMHANAS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GEDE MEGA SUPARWITHA
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 217719

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/130 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/21 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 11075 m2/8000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, LAINNYA Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **159.000.000**

1. MOBIL, HONDA CITY CAR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, YAMAHA B65A Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA --- Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **45.050.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **80.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **68.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **2.900.000.000**



Sub Total	Rp.	6.252.050.000
III. HUTANG	Rp.	110.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.142.050.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.